

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Allen, Michael dan Brian Thompson, 2002, *Cases and Materials on Constitutional and Administrative Law*, Oxford University Press, United Kingdom.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, ctk.pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, ctk. pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*, ctk.pertama, KonPress, Jakarta.
- Azhary, Tahir 1992, *negara hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ctk.keenam, Gramedia Pustaka Utama.
- Djokosutono, 1982, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dworkin, Ronald 1997, *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*, Harvard University Press, Cambridge.
- Garner, Bryan A. 1999, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., United States of America.
- Harahap, Zairin 2019, *Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Press.

- Harman, Benny K. 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, ctk.pertama, PT. Gramedia, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi, & Judicial Review*, Yogyakarta, UII Press.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Depok.
- \_\_\_\_\_, 2019, *Presiden & Pembantu Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul dan Riri Nazriyah 2018, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, ctk.kedua, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, ctk.1, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, ctk.pertama, Rajawali Pers, Depok.
- Kartayasa, Mansur, 2017, *Korupsi & Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Edisi Revisi, Jakarta.
- Manan, Bagir 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Mulyadi, Lilik 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Nasution, Adnan Buyung *Aspirasi Pemerintahan Konstitusionalitas di Indonesia*, Ctk.Pertama, Grafiti, Jakarta.
- Penyusun, Tim, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, ctk.pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1986, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, ctk.2, Alumni, Bandung.
- Raharjo, Satjipto 1985, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Baru, Bandung.
- Siahaan, Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1982, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soemantri, Sri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- Soemantri, H.R. Sri, 1997, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Subiyanto, Achmad Edy dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan dan Praktik*, ctk.pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2019.
- Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, ctk.11, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suroso, Fajar Laksono 2018, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator: Konfrontatif atau kooperatif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sutiyoso, Bambang 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ctk.I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, 2013, *Teori dan Hukum Konstitusi*, ctk.11, Rajawali Pers.
- Tjandra, W. Riawan *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi III, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Waldron, Jeremy 2002, *the dignity of legislation*, Cambridge university press, Cambridge.
- Wijk, H.D van dan Willem Konijnenbelt, 1995, *hoofdstukken van administratief recht, uitgeverij Lemma BV*, Utrecht.
- Yamin, Muh. 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, Yayasan Prapanca, Jakarta.

### **Jurnal dan Prosiding**

Atmasasmita, Romli, 2011, *Perampasan Aset Melalui Pembuktian Terbalik: Studi Perbandingan Hukum Pidana*, Majalah *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia, No,307, Juni, Jakarta.

Lindle, Hans 1976, "Due Process Of Lawmaking", *Nebraska Law Review*, Vol.55, Issue 2, Article 3.

Subiyanto, Achmad Edy, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, Maret, 2019.

Wibowo, Ahmad Ilham, dkk, "Urgensi Pengaturan Jangka Waktu Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", *Prosiding Call For Papers Hukum Kenegaraan*, Departemen Hukum Tata Negara FH UII, FH UII Press, 2021.

### **Tesis dan Disertasi**

Ghafur, Jamaludin 2011, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Atas Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Alexander, Franxy 2020, *Pengujian Formil Undang-Undang Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

### **Opini**

Mochtar, Zainal Arifin "Uji Formal dan Senja Kala Legislasi", *Opini Harian Kompas*, 31 Agustus 2021.

### **Internet**

<https://pshk.or.id/media-rr/proses-legislasi-dan-partisipasi-publik/>, diakses 6 Februari 2021.

<https://kbbi.web.id/koherensi>, diakses pada tanggal 22 Februari 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-21-22/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 054/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-59-60-63/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-III/2005 tentang pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 Pengujian UU Nomor 2 Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 Pengujian UU 1/PnPs/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VII/2010 tentang Pengujian terhadap UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VII/2010 tentang Pengujian UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Mengganggu Ketertiban Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012 tentang Pengujian terhadap UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Lingga di Provinsi Kepulauan Riau.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 tentang Pengujian terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2020 tentang Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.